

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA DAERAH
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI



**Nama : Alfiah Hasanah
NIM : 222015189**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

SKRIPSI

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA DAERAH
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : Alfiah Hasanah
NIM : 222015189**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU)
dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Terhadap Belanja Daerah pada Kab/Kota
Di Provinsi Sumatra Selatan
Nama : Alfiah Hasanah
NIM : 22201189
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, Agustus 2019

Pembimbing I,



Sunardi, Drs, S.E, M.Si

NIDN/NBM: 020604630/ 784021

pembimbing II,



Saekarini Yuliachtri, SE, M.Si

NIDN: 0211078301

Mengetahui,

Dekan

u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Betri, SE, M.Si, AK., CA

NIDN/NBM: 0216106902/944806

Halaman Pernyataan Bebas Plagiat

PERNYATAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alfiah Hasanah

Nim : 222015189

Konsentrasi : Akuntansi Sektor publik

Judul Skripsi : Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendaatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik strata 1 baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Agustus 2019



Alfiah Hasanah

Abstrak

Alfiah Hasanah/222015189/2019/Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Selatan/Akuntansi Sektor Publik.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah, Bagaimanakah pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah, Apakah terjadi *flypaper effect* pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab/Kota di Provinsi Sumatera selatan. Tujuannya Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah, Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah, Untuk mengetahui terjadi *flypaper effect* pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab/Kota di Provinsi Sumatera selatan. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Asosiatif yaitu untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di provinsi Sumatera Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Metode Analisis data yang akan digunakan adalah analisi kualitatif. Hasil Uji Secara Bersamaan menunjukkan Nilai signifikan secara bersama-sama sebesar 0,000 atau signifikan yang diperoleh itu lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, hal ini dapat digambarkan bahwa nilai $F_{hitung} 26,760 > F_{tabel} 3,305$ atau signifikan $F_{hitung} 0,000 < 0,05$, artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah signifikan memengaruhi belanja daerah.

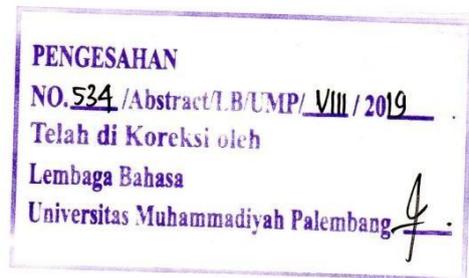
Kata Kunci : Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, *Flypaper Effect*

Abstract

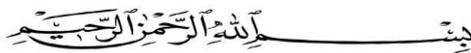
Alfiah Hasanah/222015189/2019/The Influence of General Allocation Funds and Regional Original Revenue on Regional Expenditures in South-Sumareta Province/ Public Sector Accounting.

This research is formulated in the following questions: 1) What is the influence of the General Allocation Fund (DAU) on Regional Expenditures, 2) What is the influence of the Regional Original Income (PAD) on Regional Expenditure, 3) Is there a flypaper influence on the District / City Regional Budget South Sumatra. The objectives of this research are as follows: 1) to find out the influence of the General Allocation Fund (DAU) on Regional Expenditures, 2) To determine the influence of Regional Original Revenue (PAD) on Regional Expenditure, 3) To find out the influence of a flypaper on the Regional / District Budget in South Sumatra Province. The type of this research was an associative research. The data used in this research were primary data and secondary data. The data collection method used in this research was through documentation technique. Data analysis method was a qualitative analysis. The Test Results simultaneously showed significant Values of 0,000 or significant obtained that was smaller than $\alpha = 0.05$, it can be illustrated that the value of Fobtained 26.760 > Ftable 3.305 or significant Fobtained 0.000 < 0.05. It means that Ho was rejected and Ha was accepted. In brief, general allocation funds and local revenues significantly influenced regional spending.

Keywords: General Allocation Funds, Regional Original Revenue, Regional Expenditures, Flypaper



KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Puji Syukur Penulis panjatkan Kehadirat ALLAH SWT atas segala Limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sumatra Selatan”**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang. Skripsi ini dapat tersusun dengan baik tentunya berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan yang baik ini, secara khusus penulis ingin menyampaikan Ucapan Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak DR. Abid Djazuli, SE., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta Staff Rektorat.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Drs. Sunardi SE. M.Si selaku pembimbing 1 (satu) saya.
4. Ibu Saekarini Yuliacthri SE. M.Si selaku pembimbing 2 (dua) saya.
5. Ibu Nurul Hutami Ningsih SE. M.Si selaku dosen pembimbing akademik saya.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta staff karyawan dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak Betri Sirajuddin, SE., M.Si., Ak., CA., selaku ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Untuk Pimpinan, staff, serta karyawan dan karyawan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANPOL) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) Provinsi Sumatra Selatan.
9. Bapak, Ibu, Kakak, Adik tercinta yang selalu memberikan Doa, Dukungan, Kasih Sayang, dan Keceriaan.
10. Teman-teman jurusan Akuntansi angkatan 2015 yang tetap jadi yang terbaik. Teman-teman KKN yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan motivasi kepada penulis.
11. Sahabat-sahabatku yang kusayang selalu, terimakasih atas dukungan dan motivasinya selama ini.
12. Pihak-pihak yang terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala pelajaran hidup yang sangat berharga, bermakna, dan telah mengisi hari-hari menjadi penuh warna dan bermakna. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya dan khususnya bagi peneliti-peneliti berikutnya yang ingin meneliti topik serupa.

Semoga Allah SWT membalas budi kalian dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga amal ibadah yang dilakukan ini mendapat balasan dari Allah SWT. Aamiin

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatu

Palembang, Agustus 2019
Penulis

Alfiah Hasanah

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| SAMPUL DEPAN | |
| HALAMAN JUDUL | |
| HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT | i |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... | ii |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | iii |
| HALAMAN PRAKATA | iv |
| HALAMAN DAFTAR ISI..... | vi |
| HALAMAN DAFTAR TABEL | ix |
| HALAMAN DAFTAR GAMBAR..... | x |
| HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN | xi |
| ABSTRAK | xii |
| ABSTRACT | xiii |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 12 |
| C. Tujuan Penelitian | 12 |
| D. Manfaat Penelitian | 13 |
| BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS | |
| A. Landasan Teori..... | 14 |
| 1. Belanja Daerah | 14 |
| a. Definisi Belanja Daerah | 14 |
| b. Klasifikasi Belanja Daerah..... | 16 |
| c. Tujuan Belanja Daerah..... | 18 |
| 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 19 |
| a. Definisi Pendapatan Asli Daerah | 19 |

| | |
|---|----|
| 3. Dana Alokasi Umum (DAU) | 23 |
| a. Definisi Dana Alokasi Umum | 23 |
| b. Penyaluran DAU | 24 |
| 4. Pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah | 25 |
| 5. Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah | 26 |
| B. Penelitian Sebelumnya | 27 |
| C. Kerangka Pemikiran..... | 33 |
| D. Hipotesis..... | 33 |

BAB III. METODE PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Jenis Penelitian..... | 34 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 35 |
| C. Oprasional Variabel | 35 |
| D. Populasi Dan Sampel | 36 |
| E. Data yang Diperlukan | 36 |
| F. Metode Pengumpulan Data..... | 37 |
| G. Analisis Data Dan Teknik Analisi..... | 38 |
| 1. Analisis data | 38 |
| 2. Uji Asumsi Klasik..... | 39 |
| 3. Teknik Analisis | 41 |

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Hasil Penelitian | 43 |
| 1. Gambaran Umum Sumatera Selatan | 43 |
| a. Sejarah Sumatera Selatan..... | 43 |
| b. Letak Geografis..... | 44 |
| c. Demografi | 46 |
| 2. Statistik Deskriptif | 47 |
| 3. Uji Asumsi Klasik..... | 48 |
| 4. Regresi Linier Berganda | 50 |
| 5. Uji Koefisien Determinan R^2 | 52 |
| 6. Uji Hipotesis..... | 52 |
| 1. Uji F (secara bersama-sama)..... | 52 |

| | |
|--|----|
| 2. Uji t (secara parsial) | 53 |
| B. Pembahasan Hasil Penelitian | 54 |
| 1. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah..... | 54 |
| 2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah | 56 |
| 3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah ... | 57 |
| 4. Flypaper Effect pada Provinsi Sumatera Selatan | 58 |

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 60 |
| B. Saran..... | 60 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

halaman

| | | |
|-------------|---|----|
| Tabel I.1 | Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel tahun 2017-2018 | 7 |
| Tabel I.2 | Data PAD, DAU dan BD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017..... | 11 |
| Tabel I.3 | Data PAD, DAU dan BD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018..... | 11 |
| Tabel III.1 | Oprasionalisasi Variabel | 35 |
| Tabel IV.1 | Stasistik Deskriptif..... | 47 |
| Tabel IV.2 | Model Sumary..... | 49 |
| Tabel IV.3 | Uji Regresi Linier Berganda..... | 51 |
| Tabel IV.4 | Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)..... | 52 |
| Tabel IV.5 | Uji Secara Bersama-sama | 53 |
| Tabel IV.6 | Hasil Uji Secara Parsial | 54 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-------------|---------------------------|----|
| Gambar II.1 | Kerangka Pemikiran | 32 |
| Gambar IV.1 | Uji Normalitas Data | 48 |
| Gambar IV.2 | Scatterplot | 50 |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data DAU, PAD, dan BD Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2017-2018

Lampiran 2 Tabel Statistik Deskriptif

Lampiran 3 Hasil Uji Regresi Linier Berganda, Hasil Uji Koefisien Determinan (R^2), Hasil Uji Secara Bersama-sama, Dan Hasil Uji Secara Parsial.

Lampiran 4 Jadwal Penelitian

Lampiran 5 Fotocopy Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 6 Fotocopy Surat Keterangan Riset Dari Tempat Penelitian

Lampiran 7 Fotocopy Sertifikat Lulus Membaca Surat-Surat Pendek Al-Qur'an

Lampiran 8 Fotocopy Sertifikat Toefl

Lampiran 9 Fotocopy Plagiarism Checker X Originality Report

Lampiran 10 Biodata penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang pada intinya memberi batasan bahwa Belanja Daerah ialah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Undang-Undang memberi peluang bagi daerah untuk membangun dan mengembangkan daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing kewenangan yang dimiliki akan membuat daerah lebih leluasa dalam menyusun anggaran dan pelayanan kepada masyarakat (Ika, 2018).

Anggaran adalah pedoman kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah dengan klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode (Ika, 2018).

Pemerintah memiliki berbagai anggaran diantaranya anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Anggaran pendapatan merupakan salah satu perkiraan mengenai batas penerimaan tertinggi keuangan pemerintah sebagai sumber pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai belanja negara. Anggaran belanja adalah satu perkiraan mengenai batas pengeluaran tertinggi keuangan pemerintah untuk membiayai pelaksanaan kegiatan instansi pemerintah untuk satu periode.

Otonomi daerah merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk menjadikan suatu daerah yang mandiri. Kebijakan ini dianggap sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintah yang sesungguhnya, karena kewajiban, hak, dan wewenang merupakan unsur otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Dengan adanya otonomi daerah kebutuhan daerah akan lebih terpenuhi karena pendataan kebutuhan lebih dekat dengan masyarakat sehingga pemerintah lebih memahami apa yang dibutuhkan oleh daerahnya sehingga tercapailah apa yang menjadi tujuan Otonomi tersebut yaitu meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat seperti yang ungkapkan oleh Menteri Keuangan Budiono.

Berpedoman pada Permendagri tersebut, secara menyeluruh terdapat tiga komponen Pendapatan Daerah ialah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pendapatan Lain-lain yang Sah. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan kemampuan daerah sebagai wujud desentralisasi.

Pelaksanaan desentralisasi, peran transfer tidak dapat dihindarkan mengingat otonomi yang dilimpahkan menurut daerah untuk dapat menyelesaikan berbagai urusan pemerintah yang menjadi wewenang daerah. Hal ini tentu saja mengakibatkan biaya yang harus dikeluarkan

daerah dalam mengemban urusan pemerintahan daerah lebih banyak dibanding sebelum otonomi.

Flypaper Effect ialah peristiwa dimana pemerintah daerah menggunakan Belanja Daerah lebih besar menggunakan dana transfer yang berupa Dana Alokasi Umum yang berasal dari pemerintah pusat dari pada menggunakan dana Pendapatan Asli Daerah sebagai kemampuan pemerintah daerah. Hal tersebut menyebabkan pengaruh dana transfer yang diberikan pemerintah pusat lebih besar dari pada pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah (Salawali, 2016).

Ditemukanya fenomena Flypaper Effect mengidentifikasi bahwa pemerintah daerah dalam memenuhi belanjanya lebih cenderung merespon atas pengeluaran atau belanja daerahnya dari transfer dan lebih berhemat dalam mengoptimalkan pengeluaran yang berasal dari pendapatan asli daerahnya yang merupakan hasil dari kenaikan pendapatan internal bruto sehingga akan menjadi lebih mengakibatkan kecenderungan pemborosan belanja daerah.

Pemerintah mendorong pembangunan secara nasional dengan memberikan dana transfer yang setiap tahun alokasi anggarannya semakin meningkat. Di sisi lain untuk meningkatkan kewenangan bagi pemerintah desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Mengingat kedepan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa semakin berat dalam mengelola anggarannya sehingga pemerintah desa semakin didorong untuk mendapatkan sumber pendapatan sehingga mampu lebih

menjadi efektif dan efisien dalam belanjanya. Dengan kebebasan dan hak yang dimilikinya dalam memanfaatkan dana transfer yang diterimanya, desa diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk lebih melakukan penanguhan daerah riil untuk meningkatkan perekonomian desa, pelayanan umum dan kesejahteraan di desa masing-masing.

Belanja Daerah merupakan kewajiban yang harus di kluarkan oleh daerah untuk disalurkan secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat khususnya untuk memberikan pelayanan umum. Belanja daerah yang dibagikan secara tepat ke bagian-bagian belanja yang dibutuhkan oleh masyarakat akan mendorong pertumbuhan yang positif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Indra, 2016).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tentang pedoman keuangan daerah, Belanja daerah dapat di klasifikasikan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Menurut pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Nomor. 07 tahun 2010 tentang belanja daerah dapat di klasifikasikan menjadi 1) Belanja operasi antara lain yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, belanja subsidi, dan belanja bantuan sosial. 2) Belanja modal meliputi belanja tanah, belanja peralatandan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan. 3) Belanja tidak terduga meliputi penanganan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran lainnya yang sangat dibutuhkan dalam rangka memenuhi kewajiban pemerintah daerah. (Bambang, 2017: 133).

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota (BPKAD) provinsi Sumatra Selatan melakukan pengelolaan anggaran belanja mulai dari menetapkan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi anggaran belanja. Perencanaan anggaran belanja tersebut disesuaikan dengan kebutuhan BPKAD provinsi Sumatra Selatan pada satu tahun berikutnya, dalam melaksanakan anggaran belanja sering terjadi selisih anggaran. Perbedaan antara angka anggaran (budget) dengan realisasi ini disebut penyimpangan atau *variance*, selisih lebih yang ditimbulkan oleh anggaran belanja biasa disebut *favourable*, dan selisih kurang biasanya disebut *unfavourable*.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sarita (2017) yang berjudul “*Flypaper effect* pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2014-2016” Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Uji parsial menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Daerah pada tingkat signifikan 5%. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi Flypaper Effect, sesuai dengan syarat bahwa nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah lebih besar dari nilai Koefisien Dana Alokasi Umum dan keduanya signifikan.

Penelitian sejenis dilakukan oleh Kentica Puri (2018) yang berjudul “Analisis *Flypaper Effect* Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Daerah Kab/ Kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2014” Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara *cross section* variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Daerah. Secara *time series* variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah sedangkan variabel Dana Alokasi Khusus dan jumlah penduduk memiliki pengaruh tak signifikan terhadap Belanja Daerah. Hasil uji simultan (Uji F), menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan jumlah penduduk secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan *Time Cross Section* dan *Time Series* menunjukkan bahwa adanya fenomena *Flypaper Effect* di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2014.

Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Noerdin menyatakan Bahwa proses pembahasan dan penelitian yang sudah dilaksanakan sehingga dalam perancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018 mengalami penurunan sebesar Rp. 2.075.756.291.152,99 atau turun hingga 23,12% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun Anggaran 2017 yang telah ditetapkan sebesar Rp. 8.976.397.795,04. “Hal ini disebabkan karena Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk setiap Provinsi Indonesia

termasuk Provinsi Sumsel belum ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga belum masuk dalam KUA/PPAS Tahun Anggaran 2018,” kata Gubernur dalam sambutan pada acara penandatanganan nota kesepakatan bersama antara pimpinan DPRD Sumsel dan Gubernur Sumsel terhadap Kebijakan Umum APBD (KUA) Serta Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Sumsel tahun anggaran 2018 di ruang banggar DPRD Sumsel, Selasa (31/10). Selain itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumsel tahun anggaran 2018, menurutnya, disepakati sejumlah Rp. 6.900.580.106.642,05 atau Rp. 6,9 triliun belum termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I.1
Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2018

| Keterangan | 2017 | 2018 | Naik | Turun |
|------------------------|----------------------|----------------------|------|--------|
| Pendapatan daerah | Rp.8.911476.779.409 | Rp.6.865.580.106.642 | | 22,96% |
| Belanja Daerah | Rp.7.109.417.787.739 | Rp.5.856.808.072.332 | | 17,62% |
| Penerimaan Pembiayaan | Rp. 64.859.618.385 | Rp .35.000.000.000 | | 46,04% |
| Pengeluaran Pembiayaan | Rp.1.866.918.610.055 | Rp.1.043.772.430.946 | | 44,09% |

Gubernur Sumatera Selatan juga memberikan apresiasi terhadap persetujuan nota kesepakatan bersama antara Pimpinan DPRD Sumsel dengan Gubernur Sumsel terhadap Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas utama Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Selatan tahun Anggaran 2018. Dan memberikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada DPRD Sumsel, khususnya Ketua dan jajaran Wakil Ketua dan

anggaran Badan Anggaran DPRD Sumatera Selatan serta Tim Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang telah bekerja secara baik dan bekerja untuk menyelesaikan pembahasan dan penelitian terhadap Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas utama Plapon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Selatan tahun anggaran 2018.

Menurut Gubernur Sumsel pada situasi dan kondisi keuangan negara yang terbatas, termasuk kondisi keuangan Provinsi Sumatera Selatan yang amat terbatas, memerlukan kecerdasan dalam menentukan skala prioritas anggaran sesuai arahan bapak Presiden RI. “*Money Follow Program, Priority* untuk infrastruktur serta amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan dan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Untuk terus mempertahankan agar Anggaran fungsi pendidikan diatas 20% dan anggaran fungsi kesehatan diatas 10% dari belanja daerah.

Disamping hal tersebut menurut Gubernur Sumsel dalam Kebijakan Umum APBD Tahun anggaran 2018. “Kita juga lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur, penyelenggaraan Pilkada serentak dan tugas Negara sebagai tuan rumah Asian Games Tahun 2018.. Sedangkan Ketua DPRD Sumsel HM Giri Ramandha N Kiemas berharap, semoga nota kesepakatan bersama ini dapat menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Sumsel tahun anggaran 2018 (**sumber:** beritapagi.co.id).

Pendapatan daerah Kota Palembang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan 2018 mengalami kenaikan sebesar 8,33 % atau senilai Rp 303. 593.829.324 (tiga ratus tiga milyar lima ratus sembilan tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah). Kenaikan ini berasal dari penambahan asli daerah Rp 39.736.854.960 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), kemudian penambahan dari dan pertimbangan yang merupakan transfer dari pusat Rp 47.795.554.300 (Empat puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dan penambahan dari pos pos lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 216.061.420.063 (dua ratus enam belas miliar enam puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu enam puluh tiga rupiah).

Hal ini disampaikan oleh PLH Walikota Palembang Harobin Mastofa pada rapat paripurna DPRD Kota Palembang, Selasa (31/7) di Gedung DPRD Kota Palembang Jalan Gubernur H Bastari Jakabaring Palembang. Meski ada beberapa fraksi yang mempersoalkan jabatan Plh namun mayoritas fraksi menyetujui RAPBD Perubahan dilanjutkan untuk di bahas di komisi-komisi. Dalam penjelasannya, Harobin mengatakan, terjadi juga peningkatan di pos belanja tidak langsung untuk kenaikan tambahan penghasila PNS sebesar Rp 110.649.752.470. (seratus sepuluh miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) selain itu, ada penambahan belanja

subsidi UMKM sebesar Rp 723.510.000 (tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan penambahan belanja hebat sebesar Rp 4.912.372.500 (Empat miliar sembilan ratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) serta pengalihan bantuan stimulan perumahan swadaya dari anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman kumuh ke belanja bantuan sosial sebesar Rp 5.280.000.000 (lima miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah). "Ada beberapa pos anggaran belanja tidak langsung yang meningkat," katanya.

Sementara itu, Adi Apriliansyah anggota dari fraksi PKS mengatakan, adanya usulan kenaikan belanja tidak langsung [TPP](#) sebesar Rp 110 milyar bagian paket dari pembahasan Perda integritas. Sehingga nantinya, dengan adanya peningkatan intensif pendapatan PNS tak ada lagi pungli atau lainnya. "Jadi yang saya tahu ini adanya kenaikan biaya belanja tak langsung masih ada kaitannya dengan pembahasan Raperda integritas," katanya. Sebelumnya, pada April 2018 [Pemkot Palembang](#) telah menaikkan Tunjangan Penghailan Pegawai (TPP) dilingkungan [Pemkot Palembang](#).

Pemkot beralih saat itu kenaikan TPP ini untuk meningkatkan kinerja pegawai. Sehingga dibutuhkan kesejahteraan kepada para pegawai. (sumber: palembang.tribunnews.com)

Tabel I.2
Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017

| Kabupaten/Kota | Pendapatan Asli Daerah | Dana Alokasi Umum | Belanja Daerah |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kab. Banyuasin | Rp. 121.235.723.794,49 | Rp. 930.550.856.000,00 | Rp. 1.909.404.888.586,40 |
| Kab. Empat Lawang | Rp. 33.820.586.630,00 | Rp. 41.952.841.000,00 | Rp. 750.557.059.038,64 |
| Kab. Muara Enim | Rp. 163.236.124.689,05 | Rp. 673.162.366.000,00 | Rp. 2.180.613.601.002,96 |
| Kab. Musi Banyuasin | Rp. 194.791.249.316,31 | Rp. 324.837.504.000,00 | Rp. 2.516.296.929.956,00 |
| Kab. Musi Rawas | Rp. 112.917.086.662,00 | Rp. 641.789.648.000,00 | Rp. 1.713.677.287.628,05 |
| Kab. M. Rawas U | Rp. 29.295.199.091,00 | Rp. 371.878.362.389,46 | Rp. 789.741.912.916,00 |
| Kab. Ogan Ilir | Rp. 370.255.859.937,21 | Rp. 623.839.463.000,00 | Rp. 1.452.545.157.737,95 |
| Kab. OKI | Rp. 116.025.484.970,00 | Rp. 1.049.995.034.000,00 | Rp. 2.405.340.475.694,00 |
| Kab. OKU | Rp. 95.711.482.319,40 | Rp. 635.552.000.000,00 | Rp. 1.323.436.000.000,00 |
| Kab. OKU Selatan | Rp. 42.703.243.718,09 | Rp. 588.216.178.000,00 | Rp. 1.122.067.311.706,57 |
| Kab. OKU Timur | Rp. 62.105.381.200,00 | Rp. 760.211.691.000,00 | Rp. 1.428.590.115.527,00 |
| Kab. Lematang Ilir | Rp. 35.271.945.033,26 | Rp. 319.054.010.000,00 | Rp. 821.589.125.476,05 |
| Kab. Lahat | Rp. 97.733.000.000,00 | Rp. 703.888.000.000,00 | Rp. 1.978.842.000.000,00 |
| kota Lubuk Linggau | Rp. 115.046.209.966,86 | Rp. 447.789.308.000,00 | Rp. 896.856.354.360,26 |
| Kota Pagar Alam | Rp. 51.004.156.672,00 | Rp. 390.188.364.000,00 | Rp. 945.858.698.077,86 |
| Kota Palembang | Rp. 840.572.306.099,31 | Rp. 1.210.604.984.000,00 | Rp. 3.383.208.534.684,18 |
| Kota Prabumulih | Rp. 97.008.666.626,00 | Rp. 414.173.572.000,00 | Rp. 1.018.217.047.127,30 |
| Total | Rp.2.578.733.706.724,98 | Rp.10.127.684.181.389,50 | Rp.26.636.824.499.519,20 |

Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, 2019

Tabel I.3
Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018

| Kabupaten/Kota | Pendapatan Asli Daerah | Dana Alokasi Umum | Belanja Daerah |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kab. Banyuasin | Rp. 110.633.838.345,00 | Rp. 933.631.693.000,00 | Rp. 2.035.556.230.049,00 |
| Kab. Empat Lawang | Rp. 42.061.237.157,00 | Rp. 424.811.343.000,00 | Rp. 951.766.581.667,00 |
| Kab. Muara Enim | Rp. 121.765.768.419,00 | Rp. 696.379.856.000,00 | Rp. 1.838.590.794.448,00 |
| Kab. Musi Banyuasin | Rp. 212.733.644.000,00 | Rp. 336.925.986.000,00 | Rp. 3.203.365.186.000,00 |
| Kab. Musi Rawas | Rp. 121.862.955.098,00 | Rp. 639.753.278.000,00 | Rp. 1.681.581.278.000,00 |
| Kab. M. Rawas U | Rp. 35.659.028.000,00 | Rp. 398.435.080.000,00 | Rp. 963.759.600.920,00 |
| Kab. Ogan Ilir | Rp. 203.562.235.500,00 | Rp. 623.348.780.000,00 | Rp. 1.547.169.950.112,00 |
| Kab. OKI | Rp. 356.429.244.700,00 | Rp. 1.053.840.757.000,00 | Rp. 2.241.275.403.496,00 |
| Kab. OKU | Rp. 159.534.221.797,00 | Rp. 636.233.972.000,00 | Rp. 1.463.688.662.970,00 |
| Kab. OKU Selatan | Rp. 41.950.500.000,00 | Rp. 598.063.061.000,00 | Rp. 1.303.537.687.755,00 |
| Kab. OKU Timur | Rp. 73.129.728.500,00 | Rp. 767.167.031.000,00 | Rp. 1.652.814.789.825,00 |
| Kab. Lematang Ilir | Rp. 82.956.713.030,00 | Rp. 317.402.008.000,00 | Rp. 1.580.900.901.025,00 |
| Kab. Lahat | Rp. 121.765.768.419,00 | Rp. 696.379.856.000,00 | Rp. 1.838.590.794.448,00 |
| kota Lubuk Linggau | Rp. 114.914.955.768,00 | Rp. 449.082.849.000,00 | Rp. 868.799.507.803,00 |
| Kota Pagar Alam | Rp. 62.107.054.619,00 | Rp. 391.943.478.000,00 | Rp. 826.658.246.943,00 |
| Kota Palembang | Rp.1.055.615.406.565,00 | Rp. 1.269.426.417.000,00 | Rp. 3.651.197.394.019,00 |
| Kota Prabumulih | Rp. 114.058.001.251,00 | Rp. 415.881.796.000,00 | Rp. 872.733.232.761,00 |
| Total | Rp.3.030.740.301.168,00 | Rp.10.648.707.241.000,00 | Rp.28.251.986.242.241,00 |

Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, 2019

Bedasarkan uraian latar belakang dan data anggaran PAD, DAU, dan Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Selatan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD) di Provinsi Sumatera Selatan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah?
2. Bagaimanakah pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah?
3. Apakah terjadi *flypaper effect* pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab/Kota di Provinsi Sumatra selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah.
3. Untuk mengetahui terjadi *flypaper effect* pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab/Kota di Provinsi Sumatra selatan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini akan memberikan manfaat bagi semua pihak di antaranya:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang *flypaper effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah kab/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

2. Bagi Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan bahan evaluasi serta pertimbangan dalam melaksanakan kebijakan pembangunan kedepannya.

3. Bagi Almamater

Bagi penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi serta dapat menambah wawasan dan menjadi sumber informasi yang berkaitan dengan *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Sumatera Selatan

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah Najibah Nabilah. Aris Soelistyo. Hendra Kusuma. (2016). *Analisis Flypaper Effect PAD Dan DAU Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2016*. Universitas Sumatra Utara.
- Aprilia Magie Andrea Sembel. Vekie Rumate. Debby Rotinsulu. (2018). *Pengaruh PAD Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Flypaper Effect Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2016*. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah.
- Baldric Siregar. (2017). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Bambang Supriyadi. Dadang Suwanda. Dan Agung Mahayu. (2017). *Kebijakan Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah*. Jakarta : salemba Empat
- Bangun. Sarita Ulina. (2017). *Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatra Utara Periode 2014-2016*. Universitas Sumatra Utara.
- Damas Dwi Anggiro. (2017). *Pajak Dan Retribusi Daerah*. Malang : UB Press.
- Fadillah Amin. (2019). *Penggaran Di Pemerintahan Daerah*. Malang : UB Press.
- Kentica Puri Maharani. (2018). *Analisis Flypaper Effect Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2014*.
- Nur Ahmad Budi Yulianto. Muhammad Maskan. Alifiulahtin Utaminingsih. (2018). *Metologi Penelitian Bisnis*. Malang : Polinema Press.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Mentri Dalam Negeri (Pemendagri) No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 2 Peraturan Pemerintah No.71 Tahun

2010 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas Menuju Akrual.

Ramli Faud. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Bogor : Ghslis Indonesia.

Sugiyono. (2016). Metode *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung :

Alfaeta.

Tri Anggraini. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi*

Sumatra Selatan. FE-UMP. Skripsi Tidak Di Publikasikan.

Wiratna Sujarweni. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.

Wiwin Anggraini Salawali. Paulus Kindangan Dan Agnes. Lopian. (2016).

Flypaper

Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Pengaruhnya Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah.

WR Amalia. W Nor. M Nordiansyah. (2015). *Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli*

Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan 2009-2013. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis.

Yoyo Sudaryo. Devyanthy. Sjarif. Nunung Ayu Sofiati. (2017). *Keuangan Di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Andi.